

SUB TEMA:
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Rina Trisnawati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102
email: rina.trisnawati@ums.ac.id*

Abstract

This study aimed to analyze the effect of firm size, profitability, leverage, the size of the commissioners board and managerial ownership on the corporate social responsibility disclosure. The population is banking industries listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2009-2011. The sample is 12 companies which collected by purposive sampling method. Content analysis and multiple regression analysis were used to examine the effect of firm size, profitability, leverage, the size of the commissioners board and managerial ownership on the corporate social responsibility disclosure. The results showed that firm size affect significantly the disclosure of corporate governance (p value=0.001). The other independent variables such as: profitability, leverage, the size of the commissioners board and managerial ownership do not affect the disclosure of corporate social responsibility. The future researchers should add the other variables which have effect on the CSR disclosure. They are the type of industries, IOS, auditor quality etc.

Keywords: *GRI index, disclosure, banking industries.*

A. PENDAHULUAN

Pengungkapan informasi yang terbuka mengenai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders* yang membutuhkan. Keterbukaan informasi dari perusahaan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan (Almilia dan Retrinasari, 2007).

Tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk keterlibatan sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Munculnya peraturan pengelolaan lingkungan hidup memberikan bukti adanya tekanan pemerintah untuk mendorong perusahaan memperhatikan lingkungan sosialnya. Di sini, organisasi perusahaan dituntut untuk menjadi sukses dalam lingkungan yang berubah seperti sekarang ini. Perusahaan harus secara simultan mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian kegiatannya. Dimana hal ini dapat menunjukkan

kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang telah dibentuk perusahaan, dan tentunya diharapkan dapat menggambarkan tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*) perusahaan.

Harahap (2001: 356-358) menggambarkan aktivitas perusahaan dalam tiga model, yaitu: (1) *Model Klasik* – bahwa tujuan perusahaan hanya untuk mencari untung yang sebesar-besarnya; (2) *Model Manajemen* – bahwa manajer sebagai orang yang dipercayai oleh pemilik modal menjalankan perusahaan bukan hanya untuk kepentingan pemilik modal, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder* lain yang berkepentingan atas eksistensi perusahaan tanpa adanya hubungan kontraktual; dan (3) *Model Lingkungan Sosial* – manajer meyakini bahwa kekuatan ekonomi dan politik yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan dengan atau bersumber dari lingkungan sosial, bukan semata-mata bersumber dari kekuatan pasar seperti diyakini oleh model klasik.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* (Mathews, 1995) atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Sembiring, 2005).

Bank Dunia mendefinisikan *CSR* sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, untuk bekerja bersama karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, sedemikian rupa sehingga baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan. Hingga saat ini belum ada definisi tetap atas tanggung jawab sosial, masing-masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam mengenai *CSR*. Keragaman ini sesungguhnya merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi yang mendefinisikan *CSR*, walaupun secara garis besar dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki benang merah yang sama. Secara umum *CSR* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, social dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, yang dapat artikan sebagai *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Yulita, 2010).

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dasar hukum CSR juga tertuang dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 UU RI Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan managerial terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, standar pelaporan yang sudah dikenal untuk mengimplementasikan CSR yaitu GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI merupakan sebuah organisasi yang telah memelopori perkembangan pengungkapan CSR dan menggunakan rerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia ([www. Globalreporting.org](http://www.Globalreporting.org)). Penelitian mengenai pengungkapan CSR dengan

menggunakan standar GRI telah digunakan secara luas oleh beberapa peneliti (Almilia dan Retrinasari, 2007; Anggraini, 2006; Rahman dan Widayarsi, 2008; Sembiring, 2005 Veronica, 2008). Berbagai penelitian tersebut melakukan pengungkapan CSR pada industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan index GRI (78 item). Febrina dan Suaryana (2011) menggunakan 79 item, Selanjutnya, Permatasari (2012) menggunakan 121 item berdasarkan laporan GRI tahun 2011.

Penerapan GRI pada industri perbankan juga telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Fitria dan Hartanti (2010), melakukan penelitian terhadap 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. Berdasarkan indeks GRI, nilai tertinggi sebesar 46% dan berdasarkan indeks ISR sebesar 58%. Pengukuran yang digunakan adalah indeks GRI (72 item dan Islamic Social Reporting (ISR) dikembangkan berdasarkan AAOIFI Trisnawati (2011) melakukan analisis pengungkapan CSR pada bank konvensional dan syariah di Indonesia menggunakan indeks GRI 78 item. Hasil penelitiannya konsisten dengan temuan Fitria dan Hartanti (2010) bahwa pengungkapan CSR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah yaitu 52% dan 37%. Selanjutnya Trisnawati, et.al (2013) melakukan analisis pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan indeks ISR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan dengan ISR sebesar 50.68%

Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya menggunakan model indeks Islamic Social Reporting (ISR) yang dikembangkan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Hanifa, 2002; Maali, et. al, 2006; Ousama dan Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; Othman ,et. al, 2009). Secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Penelitian terkait dengan pengungkapan CSR pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks ISR yang dikembangkan AAOIFI telah dilakukan Fitria dan Hartanti (2010); Hasan dan Harahap (2010); Sofyani et.al (2012); Azhar dan Trisnawati (2013)

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengukuran dengan menggunakan indeks GRI (72 item, 78 item, 79 item, dan 121 item) tidak menunjukkan skor pengungkapan yang maksimum, Rata-rata pengungkapannya dibawah 50%. Maka penelitian ini didesain untuk melakukan pengungkapan CSR pada industri perbankan di Indonesia mengingat tidak optimalnya skor pengungkapan CSR berdasarkan indeks tersebut. Indeks yang digunakan adalah indeks GRI yang disesuaikan (90 item dengan 10 suplemen). Hal ini

merujuk pada penelitian Trisnawati et al. (2013) dengan melakukan content analisis dan decomposition analisis terhadap indeks GRI 121 item dan ISR.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Ukuran perusahaan

Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Sulastini, 2007). Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya. Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lain adalah perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Yulita, 2010). Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*

Profitabilitas

Anggraini (2006) menyatakan bahwa profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas. Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca "*good news*" kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*

Leverage

Tingkat *leverage* adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Menurut Belakoui dan Karpik (1989) dalam Untari (2010), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*. Anggraini (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Supaya laba yang dilaporkan lebih tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Sembiring, 2005). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik karena pihak luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan secara lebih obyektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan CSR. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Kepemilikan Manajerial

Mathiesen (2004) dalam Febrina dan Suaryana (2011) menyatakan bahwa, secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider Ownership* ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial memperoleh keuntungan khusus atas biaya CSR dari pemegang saham lainnya, struktur kepemilikan modal harus memegang peranan dalam penetapan jumlah pengeluaran CSR. Fama dan Jensen (1983) dalam Sembiring (2005) menyatakan tingkat kepemilikan manajemen yang tinggi cenderung untuk tetap bertahan, dimana manajemen dapat melakukan program CSR dengan mudah, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula untuk melakukan program CSR. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang melalui survei untuk mendapatkan data laporan keuangan tahunan 2009-2011 bank-bank syariah maupun konvensional. Berdasarkan data dari www.bi.go.id, Di Indonesia terdapat 123 bank *go public* yang terdiri dari 1 bank sentral, 4 bank BUMN, 33 Bank Umum Swasta Nasional/BUSN Devisa (3 diantaranya bank syariah yaitu BMI, BSM dan Bank mega Sy), 33 Bank Umum Swasta nasional/ BUSN non devisa (2 diantaranya bank syariah yaitu BRI sy dan BUKOPIN sy), 26 bank regional, 17 bank *joint venture*, 9 bank asing dan 5 bank syariah. Sampel didasarkan pada teknik *purposive*.

Berdasarkan survei dari Bank Indonesia bulan Mei 2011, terdapat 7 bank besar (total aktiva yang dimiliki Rp.1 - Rp.10 trillion (\$117 - \$1.17 billion)). Rating bank-bank tersebut dalam katagori sangat baik. Yaitu Bank CIMB Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Panin dan Bank Negara Indonesia 46. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 bank konvensional (bank besar) dan 5 bank syariah (seluruh bank syariah dijadikan sampel) yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Data yang diperlukan adalah 36 laporan keuangan tahunan dari sampel yang digunakan.

Variabel dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan setiap bank. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang disesuaikan yang terdiri dari 90 item dan 10 suplemen pengungkapan (Trisnawati, 2012). Indikatornya meliputi : (1) strategi dan analisa, (2) profil organisasi, (3) parameter laporan, (4) tatakelola organisasi, (5) kinerja ekonomi, (6), kinerja lingkungan, (7) kinerja sosial, (8) ketenagakerjaan , (9) masyarakat dan (10) Tanggung jawab terhadap produk. Untuk indikator Investasi dan keuangan yang mencakup aktifitas aktifitas riba, gharar, zakat, kebijakan mengatasi keterlambatan pembayaran oleh klien yang gagal bayar dimasukkan sebagai suplemen karena indikator ini sangat spesifik (khusus bank syariah) dan seluruh bank syariah mengungkapkannya. Setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan akan diberi skor 1 sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan akan diberi skor 0. Perhitungan indeks pengungkapan CSR adalah:

$$CSR = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan}}$$

Analisis data menggunakan *content analisis* terhadap pengungkapan CSR pada bank di Indonesia, baik menggunakan indeks GRI (121 item) maupun indek ISR yang dikembangkan oleh AAOIFI (72 item). Selanjutnya, berdasarkan hasil pengungkapan CSR tersebut dilakukan decomposition analisis dengan melakukan penyesuaian dan atau menghapus beberapa item yang tidak relevan. Artinya jika seluruh bank tidak mengungkapkan item tersebut (memiliki nilai 0) maka tidak digunakan sebagai alat ukur. Selain itu dipertimbangkan item-item lain yang relevan dengan dasar laporan CSR bank maupun publikasi lain yang bersumber pada website bank tersebut. Konvergensi dilakukan terhadap kedua indeks tersebut (setelah penyesuaian) dengan merujuk pada cara yang dilakukan Fitria dan Hartanti (2010)

Setelah dilakukan scoring terhadap seluruh item CSR berdasarkan indeks GRI yang disesuaikan (Trisnawati, 2012), selanjutnya dilakukan **analisis regresi berganda** untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap indeks pengungkapan CSR dengan persamaan sebagai berikut ini.

$$\text{IPCSR} = \alpha + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{ROA} + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{UDK} + \beta_5 \text{KM} + e$$

Keterangan:

IPCSR = Indeks pengungkapan CSR

Ln_TA = Logaritma natural total aset

ROA = profitabilitas

LEV = leverage

UDK = Ukuran dewan komisaris

KM = Kepemilikan manajerial

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien korelasi variabel

e = Standar error

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan yang diproksi dengan Ln total aktiva sesuai penelitian Untari (2010), Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,563 dan nilai signifikansi 0,001. Dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih besar lebih mampu membiayai penyediaan informasi pertanggungjawaban sosialnya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_1) dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh *size* perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang ditemukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007), Sulastini (2007), Untari (2010) serta Febrina dan Suaryana (2011).

Bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan telah ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulastini (2007). Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan

kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya. Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil (Yulita, 2010).

2. Profitabilitas (ROA)

Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Hal ini didukung dengan pendapat bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca "*good news*" kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan berinvestasi di perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini profitabilitas yang dinyatakan dalam ROA sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulita (2010), menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,149 dan nilai signifikan sebesar 0,882. Ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Hal ini karena adanya UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program tahunan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, besar atau kecilnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis kedua (H_2) tetapi mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulastini (2007), Rosmasita (2007), Marpaung (2010), Yulita (2010) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2008) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. *Leverage* (LEV)

Menurut Untari (2010), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Pada penelitian ini *leverage* yang dinyatakan dalam *debt to asset* atau *leverage* (LEV) seperti penelitian yang dilakukan oleh Rawi dan Muchlish (2010), menunjukkan bahwa variabel *leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,771 dengan nilai signifikansi sebesar 0,446. Ini berarti bahwa besar kecilnya *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Hal ini karena adanya UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program tahunan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, besar atau kecilnya tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis ketiga (H_3) tetapi mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Rosmasita (2007), Rahman dan Widayarsi (2008), Rawi dan Muchlish (2010), Untari (2010), serta Febrina dan Suaryana (2011) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan..

4. Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Sembiring, 2005).

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris dinyatakan dengan jumlah anggota dewan komisaris sesuai penelitian yang dilakukan oleh Febrina dan Suaryana (2011), menunjukkan variabel ukuran dewan komisaris (KOM) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,469 dan nilai signifikansi 0,151. Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan tersebut karena kebijakan CSR merupakan langkah strategis dari manajemen bukan dari dewan komisaris dan dewan komisaris tidak terlibat langsung terhadap kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis keempat (H_4) dan teori agensi yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti penelitian Febrina dan Suaryana (2011) yang menemukan ketidakefektifan dewan komisaris dalam menekan manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

5. Kepemilikan Manajerial (KM)

Fama dan Jensen (1983) menyatakan tingkat kepemilikan manajemen yang tinggi cenderung untuk tetap bertahan, dimana manajemen dapat melakukan program CSR dengan mudah. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula untuk melakukan program CSR.

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial dinyatakan dengan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dan direksi perusahaan sesuai penelitian yang dilakukan oleh Febrina dan Suaryana (2011), menunjukkan variabel kepemilikan manajerial (MAN) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,227 dan nilai signifikansi 0,229. Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Karena manajemen lebih berfokus untuk meningkatkan nilai perusahaan yang akan menguntungkan bagi mereka dan pemilik perusahaan daripada CSR.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis kelima (H_5). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Widayarsi (2008), dan Febrina dan Suaryana (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), dan Rawi dan Muchlish (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

E. SIMPULAN

1. Ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, hipotesis pertama (H_1) diterima, ini berarti bahwa

- semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya.
2. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, hipotesis kedua (H_2) ditolak, ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.
 3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, hipotesis ketiga (H_3) ditolak, ini berarti bahwa besar kecilnya *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
 4. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, hipotesis keempat (H_4) ditolak, ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
 5. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, hipotesis kelima (H_5) ditolak, ini berarti bahwa sedikit atau banyaknya jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian sehingga sampel penelitian yang digunakan lebih banyak.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*, misalnya klasifikasi industri, kesempatan investasi, status auditor dan lain-lain.
3. Peneliti selanjutnya perlu melakukan pengujian alat ukur GRI ini untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih valid untuk mengatasi masalah subjektifitas dalam penilaian indeks pengungkapan *CSR*. Implementasi dan pengujian model perlu dilakukan untuk mengukur validitas alat ukur GRI ini.

PERSANTUNAN

*Ucapan terimakasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penelitian unggulan PUPS tahun 1 dan 2 (Fatchan Ahyani, Zulfikar, Erma Setiawati, Mujiyati, Nursiam, Fachri Ali Azhar, Dimas Bangkit A dan Yusuf Abdullah)

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L Spica dan Retrinasari Ikka, 2007. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengaruh dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI", *Proceedings Seminar Nasional FE Universitas Trisakti*: hal 1-14.
- Anggraini, FR, Reni Retno, 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan: (Study Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ)", *Proceedings SNA IX*.
- Azhar, Fahri Ali dan Trisnawati, 2012. "Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia", *Proceedings, Seminar Nasional SANCALL 2013*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, ISBN 878-979-636-147-2. Maret.
- Baydoun, N. and Willet, R., 1997. "Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information, Accounting, Commerce and Finance". *The Islamic Perspective*, Vol. 1 No. 1: pp.1-25
- Bourin, G and Savarina R. 2004. "Determinants Of The Corporate Decision To Disclose Social Information", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2(1): 36-51.
- Burke, M.C and Rodrigues, L.C.L., 2006, "Communication Of Corporate Social Responsibility By Portugese Banks, A Legitimacy Theory Perspective". *Corporate Communication: an International Journal*, 11(3): 232-248
- Clarkson, A.B. and Dixon, R.1995. "Environmental Risk And Management Strategy: The Implications For Financial Institutions". *The International Journal of Bank Marketing*, 3(2): 22-29.
- Darus, F. 2008. "Influence Of Institutional Pressure And Ownership Structure On Corporate Social Responsibility Disclosure", *Interdisiplinary Journal of Contemporary research in Business*, 1(5): 123-150.
- Deringer, F.B. 2005, "The Worldbank Is Not Enough". *Equator Principle Survey*, 2005
- Fandinata H., 2012. "Perbandingan Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional Dengan Bank Syariah". <http://hiskiafandinata.blogspot.com>. Diunduh tanggal 28 Oktober 2012.

- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti, 2010. "Islam Dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks", *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, UNSOED
- Jaafar, Faridah, Faiszah Darus and Indra Devi R. 2010. "Environmental Disclosure In Malaysian Banking Sector", *Malaysia-Indonesia International Conference On Economics, Management And Accounting, Proceedings*, 26-27 November, Malaysia.
- Hackson, D and Milne, M.J. 2006."Some Determinant Of Social And Environmental Disclousure In New Zealand Companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(1): pp. 77-108.
- Hilman, Keinn. 2001. "Corporate Social Disclosure By Banks And Finance Companies: Malaysian Evidence", *Corporate, Ownership and Control* 1(4): 118-130.
- Haniffa, R. 2002. "Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective". *Indonesian Management & Accounting Research* 1 (2): pp.128-146.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. 2001. "A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm", a *Working Paper*. International Conference on Accounting, Auditing and Finance. Palmerstone North, New Zealand, Unpublished article.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101-106*". Jakarta: Salemba Empat.
- Lanros P, 2001."Equator Principles Or How I Learned To Stop Worrying And Sustainability", *Impact Assesment and Project Appraisal*, 27 (1).
- Maali, B., Casson, and P., Napier, C. 2006. "Social Reporting by Islamic Banks". *ABACUS*, 42 (2): pp 266-289.
- Maali, B., Casson, P., Napier, C. 2003. "*Social Reporting by Islamic Banks*". University of Southampton, Number AF03-13.
- Muhammad., 2000. "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", Cetakan I, Yogyakarta: UII.
- Othman, R., Md. Thani, A., K. and Ghani, E. 2009. "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia". *Research Journal of International Studies – Issue 12(October, 2009)*.
- Permatasari, Indah. 2012. "*Analisis Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*". E-library UMS/repository/Skripsi/index
- Rahmawati dan Hartanti, Dwi, 2010. "Pengaruh Budaya dan Sosial Politik dalam Tampilan Situs Laporan Pertanggungjawaban sosial Perusahaan: Studi Perbandingan Perusahaan Migas Indonesia dan Perusahaan Migas Amerika Serikat", *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto: Hal 1-42.

- Rahman, Arief dan Widayarsi, Karunia Nur. 2008. "The Analysis of Company Characteristic Influence Toward CSR Disclosure: Empirical Evidence of Manufacturing Companies Listed in JSX", *JAAI* Volume 12 No.1: hal 25.
- Rammal Husain G, Kamla Rania. 2010. "*Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter?*". International Graduate School of Business University of South Australia, School of Accounting and Finance The University of Dundee United Kingdom Australia.
- Sairally, Salma. 2005. "Evaluating the 'Social Responsibility' of Islamic Finance: Learning From the Experiences of Socially Responsible Investment Funds". *The 6th International Conference on Islamic Economic and Finance*
- Sembiring, E Rismanda, 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di BEJ)", *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VIII*: hal 379-395.
- Sofyani, Hafiez; Wahjuni L. Sri, , Ihyaul Ulum dan Daniel Syam., 2012. "Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)". *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 4, No. 1, Maret 2012: pp. 36-46.
- Suharto, Edi. 2006. "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", Edisi ke-2, Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, M. 2004. "*Environmental Disclosure In Malaysian Annual Report : A Legitimacy Theory Perspective*", *International Journal of Commerce and Management*, 14(1): 44-48
- Silber, J. & Weber, M. 2009. "Labour Market Discrimination: Are There Significant Differences Between The Various Decomposition Procedures?" *Journal Applied Economics*, Vol. 31:351-369.
- Trisnawati, Rina. 2011. "Social Responsibility and Enviromental Disclousure of Annual Report in Banking Sector-Indonesian Listed Companies". *Proceedings, International Conference Committee 2010-2011* January 2011, Auditorium UMS.
- Trisnawati, Rina; Fahri Ali Azhar dan Dimas Bangkit A, 2013. "*Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Bank Syariah Di Indonesia*", Laporan Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa, FE UMS, Tidak Dipublikasikan
- Trisnawati, Rina; Fatchan Ahyani, Zulfikar, Erma Setiawati dan Mujiyati. 2013. *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Komparasi Industri Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia)*. Laporan Penelitian PUPS Tahun 1, LPPM UMS.

- Trisnawati, Rina; Nursiam, Zulfikar, Erma Setiawati dan Mujiyati. 2014. *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Komparasi Industri Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia)*. Laporan Penelitian PUPS Tahun 2, LPPM UMS.
- Trisnawati, Rina. 2012. "Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Terakreditasi SK Dikti Nomor 81/Dikti/Kep/2011. Vol 16 No 2, Des 2012.
- Veronica, Theodora Martina, 2008. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Artikel Internet, www.google.com, diakses tanggal 11 Desember 2011.
- Wibisono, Yusuf. 2007. "Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility". Cetakan Kedua. Gresik: Fanchu Publishing.

